

ANALISIS KESIAPAN MAHASISWA CALON GURU TERHADAP KEBIJAKAN MBG DI SEKOLAH (Tinjauan Teori Implementasi George C. Edwards III)

Sri Yunita Simanjuntak✉

Pendidikan Administrasi Perkantoran, Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia

Email: sri.yunita@unm.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.46880/methoda.Vol16No2.pp148-155>

ABSTRACT

The Free Nutritious Meal (MBG) policy in schools represents a strategic government move to enhance human capital quality and combat stunting. However, the success of its implementation hinges significantly on the readiness of stakeholders, including pre-service teachers who will eventually serve as implementers in schools. This study aims to analyze the readiness of pre-service teachers regarding the MBG policy using George C. Edwards III's policy implementation theory, which encompasses four key indicators: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. A descriptive qualitative method was employed, utilizing open-ended surveys distributed to fourth-semester students in the Office Administration Education study program. The findings indicate that communication regarding policy dissemination remains limited, while regarding resources, students perceive a need for specialized training in program logistics management. Student disposition reflects a positive and supportive attitude, though there are concerns regarding the burden of ancillary administrative tasks. Regarding bureaucratic structure, clear task allocation (Standard Operating Procedures) is essential to avoid distorting the teacher's primary role of instruction. Overall, pre-service teachers demonstrate good mental readiness but require strengthened managerial competencies before being deployed to schools.

Keywords: Free Nutritious Meal (MBG), Pre-service Teacher Readiness, George C. Edwards III Theory, Policy Implementation.

ABSTRAK

Kebijakan Makanan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah merupakan langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memerangi stunting. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kesiapan para pemangku kepentingan, termasuk calon guru yang nantinya akan bertindak sebagai pelaksana di sekolah. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan calon guru terkait kebijakan MBG menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, yang mencakup empat indikator utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode kualitatif deskriptif digunakan, dengan memanfaatkan survei terbuka yang dibagikan kepada mahasiswa semester empat program studi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Temuan menunjukkan bahwa komunikasi terkait penyebaran kebijakan masih terbatas, sedangkan terkait sumber daya, mahasiswa merasakan kebutuhan akan pelatihan khusus dalam manajemen logistik program. Disposisi mahasiswa mencerminkan sikap positif dan mendukung, meskipun ada kekhawatiran mengenai beban tugas administratif tambahan. Mengenai struktur birokrasi, alokasi tugas yang jelas (Prosedur Operasi Standar) sangat penting untuk menghindari distorsi peran utama guru dalam

pengajaran. Secara keseluruhan, calon guru menunjukkan kesiapan mental yang baik tetapi membutuhkan peningkatan kompetensi manajerial sebelum ditempatkan di sekolah.

Kata Kunci: Makanan Bergizi Gratis (MBG), Kesiapan Calon Guru, Teori George C. Edwards III, Implementasi Kebijakan.

PENDAHULUAN

Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia menjadi salah satu program populis sekaligus strategis dalam upaya meningkatkan mutu kesehatan dan fokus belajar siswa di sekolah. Program ini dirancang untuk memutus rantai stunting serta mempersiapkan generasi emas Indonesia melalui asupan nutrisi yang optimal sejak dini. Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada aspek pemenuhan gizi, melainkan juga menuntut kesiapan kelembagaan sekolah secara menyeluruh sebagai lokus utama pelaksanaan. Tanpa adanya kesiapan dari ekosistem sekolah, dikhawatirkan program nasional ini hanya akan menjadi beban administratif baru bagi institusi pendidikan (Nugroho, 2023).

Sekolah sebagai unit pelaksana teknis membutuhkan sumber daya manusia yang responsif, adaptif, dan siap mengelola program MBG secara akuntabel. Di sinilah peran guru dan calon guru menjadi sangat krusial, karena mereka tidak lagi sekadar bertindak sebagai pengajar di dalam kelas. Dalam konteks program MBG, guru sering kali harus merangkap tugas sebagai pengawas distribusi makanan, pemantau higienitas, hingga pencatat administratif harian. Kompleksitas tugas baru ini memerlukan kesiapan kompetensi dan mentalitas yang matang dari para mahasiswa calon guru yang kelak akan langsung terjun menghadapi dinamika tersebut di lapangan (Handayani dan Fitriani, 2023).

Mahasiswa semester 4 program studi Pendidikan Administrasi Perkantoran memiliki relevansi akademik yang kuat dengan tantangan ini, mengingat fokus studi mereka mencakup manajemen dan tata kelola organisasi. Melalui pemahaman mendalam tentang administrasi, kelompok mahasiswa ini diharapkan mampu mengidentifikasi celah-celah manajemen yang mungkin terjadi saat kebijakan MBG diintegrasikan ke dalam rutinitas sekolah. Kesiapan mereka menjadi indikator penting bagi

potret masa depan implementasi kebijakan ini, sebab persepsi dan pemahaman awal calon guru akan membentuk pola tindakan mereka ketika telah resmi mengabdikan diri di lembaga pendidikan formal (Setyawan dan Rahmawati, 2025).

Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya jarak komunikasi yang cukup lebar antara perumus kebijakan di tingkat pusat dengan mahasiswa di perguruan tinggi LPTK. Kurangnya sosialisasi formal mengenai mekanisme teknis program MBG memicu keraguan di kalangan mahasiswa mengenai porsi keterlibatan mereka nantinya di sekolah. Banyak calon guru yang merasa khawatir jika tugas-tugas pengelolaan makan gratis ini justru akan mendistorsi waktu dan fokus mereka untuk mengembangkan kompetensi pedagogik utama. Kesenjangan informasi ini berpotensi menurunkan efektivitas kesiapan mereka dalam menyongsong regulasi baru yang telah ditetapkan pemerintah (Yahya, 2024).

Untuk mengurai kompleksitas fenomena tersebut, diperlukan sebuah pisau analisis yang komprehensif, salah satunya adalah Teori Implementasi Kebijakan dari George C. Edwards III. Teori ini membedah keberhasilan sebuah kebijakan melalui empat faktor kritis: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang saling memengaruhi. Dengan memetakan persepsi mahasiswa melalui kacamata teori Edwards III, dapat diidentifikasi secara jelas faktor mana yang sudah optimal dan faktor mana yang masih memerlukan intervensi akademis maupun birokratis. Pendekatan teoretis ini memberikan landasan ilmiah yang kuat dalam menilai kesiapan aktor pelaksana (Santoso, 2023).

Penelitian ini memfokuskan diri pada analisis kesiapan mahasiswa calon guru dengan mengintegrasikan perspektif administrasi perkantoran dalam manajemen sekolah abad ke-21. Urgensi penelitian ini terletak pada penyediaan data empiris mengenai sejauh mana kesiapan calon pendidik dalam menghadapi pergeseran

peran akibat adanya kebijakan MBG. Melalui eksplorasi ini, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi strategis bagi perguruan tinggi untuk menyesuaikan kurikulum atau pembekalan praktis. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan agar merancang regulasi MBG yang ramah terhadap beban kerja guru di sekolah (Zainuddin, dkk. 2026).

Research Gap, Empirical Gap, dan Practical Gap

Meskipun kajian mengenai kebijakan program gizi anak sekolah telah banyak diteliti di lingkup global maupun nasional, masih terdapat celah penelitian (gaps) yang signifikan:

a. Research Gap (Kebaruan / Novelty): Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada dampak kesehatan/nutrisi siswa atau evaluasi kesiapan infrastruktur sekolah dasar secara

umum. Belum ada penelitian empiris yang secara spesifik meneliti kesiapan persepsional dan manajerial mahasiswa calon guru (calon pendidik) sebelum mereka terjun ke lapangan.

- b. Empirical Gap: Literatur yang ada cenderung meneliti persepsi guru senior yang sudah mengajar, sehingga menciptakan kekosongan data empiris mengenai sejauh mana LPTK telah menyiapkan mahasiswa calon guru dalam merespons kebijakan publik strategis nasional.
- c. Practical Gap: Di lapangan, terjadi kesenjangan komunikasi antara perumus kebijakan (top-level policymaker) dengan calon praktisi pendidikan. Tanpa adanya pemetaan kesiapan sejak dini, calon guru berisiko mengalami role ambiguity (kebingungan peran) dan resistensi kerja ketika menghadapi tugas administratif tambahan dari program MBG.

Tabel 1. Pemetaan Penelitian Terdahulu dan Posisi Kebaruan (Novelty) Penelitian Ini

Penelitian Terdahulu	Fokus / Temuan Utama	Kelemahans / Celah Penelitian	Kebaruan (Novelty) Penelitian Ini
Santoso (2023)	Menganalisis Teori Edwards III pada program bantuan makanan di sekolah.	Hanya menggunakan pendekatan kualitatif naratif tanpa data terukur.	Mengukur secara kuantitatif tingkat kesiapan calon guru menggunakan instrumen Skala Likert berbasis indikator Edwards III.
Handayani & Fitriani (2023)	Kesiapan non-instruksional calon guru dalam program ekstra kurikuler.	Tidak secara spesifik membahas kebijakan kesehatan/gizi nasional MBG.	Menjadikan Kebijakan MBG sebagai fokus utama evaluasi kesiapan calon pendidik.
Ramadhan & Utami (2024)	Analisis beban kerja administratif guru dalam kebijakan baru.	Berfokus pada guru aktif, bukan pada persepsi mahasiswa calon guru.	Mengevaluasi kesiapan prospektif mahasiswa calon guru LPTK sebelum penugasan ke sekolah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini disatukan dalam dua pertanyaan utama yaitu bagaimana tingkat kesiapan mahasiswa calon guru ditinjau dari dimensi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan MBG serta dimensi manakah dari Teori George C. Edwards III yang menjadi tantangan terberat bagi kesiapan mahasiswa calon guru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengukur tingkat kesiapan mahasiswa calon guru terhadap kebijakan MBG berdasarkan empat dimensi Teori Edwards III, serta merumuskan rekomendasi praktis bagi LPTK dan perumus kebijakan.

LANDASAN TEORI

Untuk mengevaluasi kesiapan calon guru secara komprehensif, penelitian ini mengadopsi Teori Implementasi Kebijakan dari George C. Edwards III (1980). Edwards III menyatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat faktor krusial:

- a) Komunikasi (Communication): Proses penyampaian informasi kebijakan agar diterima dengan jelas, konsisten, dan akurat oleh para pelaksana, sehingga mengurangi salah penafsiran serta memastikan koordinasi antar-aktor berjalan secara efektif.

- b) Sumber Daya (Resources): Dukungan krusial yang mencakup ketersediaan staf berkompeten, wewenang hukum, fasilitas pendukung, peralatan, dana, serta alokasi waktu yang memadai untuk mengoperasikan dan merealisasikan sasaran kebijakan publik secara optimal.
- c) Disposisi (Disposition): Sikap, komitmen, insentif, dan tata nilai para pelaksana dalam menerima serta menjalankan kebijakan, yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan melalui adanya kehendak kuat dan motivasi kerja.
- d) Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure): Mekanisme tata kerja organisasi yang mencakup kejelasan Prosedur Operasional Standar (SOP) dan pembagian tanggung jawab secara proporsional untuk meminimalkan fragmentasi serta mempermudah alur koordinasi antarunit pelaksana.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode survei. Pendekatan ini dipilih untuk mengukur secara presisi persepsi dan tingkat kesiapan responden melalui distribusi frekuensi dan persentase pada indikator-indikator yang terukur secara sistematis.

Populasi dan Teknik Sampling

Populasi penelitian adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Makassar yang telah menempuh mata kuliah dasar kependidikan dan manajemen organisasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling dengan pendekatan convenience sampling, dikarenakan keterbatasan aksesibilitas langsung pada saat periode pengumpulan data

survei digital. Jumlah sampel yang berpartisipasi penuh adalah 58 mahasiswa semester 4.

Instrumen Penelitian

Pengumpulan data menggunakan kuesioner terstruktur tertutup (close-ended questionnaire) berbasis Skala Likert 5 Poin (1 = Sangat Tidak Setuju [STS], 2 = Tidak Setuju [TS], 3 = Netral [N], 4 = Setuju [S], 5 = Sangat Setuju [SS]). Instrumen dikembangkan berdasarkan 4 dimensi Teori Edwards III.

Uji Validitas: Validitas instrumen diuji melalui Expert Judgment oleh dua orang ahli (pakar manajemen pendidikan dan pakar kebijakan publik). Hasil evaluasi menyatakan bahwa seluruh butir pernyataan relevan dan valid secara konseptual.

Uji Reliabilitas: Uji reliabilitas internal menghasilkan nilai Cronbach's Alpha sebesar $\alpha = 0,87$, yang menunjukkan bahwa instrumen penelitian memiliki keandalan/reliabilitas yang tinggi (kategori sangat baik).

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dengan menghitung persentase distribusi frekuensi pada tiap kategori respons. Formula persentase yang digunakan adalah:

$$P = (f / N) \times 100\%$$

Keterangan:

P = Persentase respons;

f = Frekuensi jawaban;

N = Total responden (N = 58)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Data persepsi 58 responden mengenai kesiapan mengimplementasikan kebijakan MBG disajikan berdasarkan 4 dimensi Teori George C. Edwards III:

Tabel 2. Distribusi Persentase Respons Responden Berdasarkan Dimensi Edwards III (N = 58)

Dimensi Edwards III	SS (%)	S (%)	N (%)	TS (%)	STS (%)
1. Komunikasi	5,8%	42,7%	40,4%	9,4%	1,8%
2. Sumber Daya	2,9%	36,5%	49,4%	9,4%	1,8%
3. Disposisi	4,1%	37,4%	37,4%	17,0%	4,1%
4. Struktur Birokrasi	8,3%	47,3%	36,7%	5,9%	1,8%

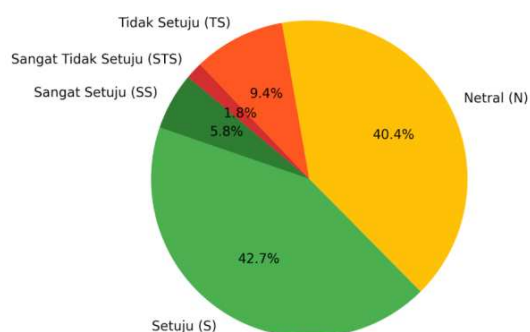
Secara rincian per dimensi:

1. Dimensi Komunikasi: Sebanyak 42,7% responden menyatakan Setuju dan 5,8% Sangat Setuju bahwa informasi dasar MBG telah diterima dengan baik. Namun, sebesar 40,4% responden bersikap Netral, yang menunjukkan adanya keraguan terkait kejelasan rincian teknis tugas operasional guru di lapangan.
2. Dimensi Sumber Daya: Pilihan Netral menjadi respons dominan (49,4%), diikuti oleh Setuju (36,5%). Hal ini mengindikasikan bahwa responden merasa belum dibekali kemampuan manajerial logistik gizi yang cukup selama perkuliahan.
3. Dimensi Disposisi: Tingkat persetujuan (37,4%) dan netral (37,4%) berimbang. Namun, tingkat ketidaksetujuan gabungan (TS + STS) mencapai 21,1%. Ini menandakan adanya kekhawatiran signifikan terkait potensi pembengkakan beban kerja non-pengajaran.
4. Dimensi Struktur Birokrasi: Memperoleh akumulasi persetujuan tertinggi (Setuju 47,3% + Sangat Setuju 8,3% = 55,6%). Latar belakang pendidikan di Administrasi Perkantoran membuat responden sangat familiar dengan konsep koordinasi dan tata kerja birokrasi.

Pembahasan

Dimensi pertama dalam teori George C. Edwards III adalah Komunikasi, yang berfokus pada bagaimana pesan kebijakan ditransmisikan kepada pelaksana agar terjadi kejelasan dan konsistensi instruksi. Berdasarkan hasil pengolahan data, indikator komunikasi menunjukkan respons yang cukup positif, di mana sekitar 42.7% responden menyatakan setuju bahwa informasi mengenai maksud dan tujuan kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) telah tersampaikan dengan baik. Namun, terdapat sekitar 40.4% responden yang memilih posisi netral, yang menandakan bahwa sosialisasi mengenai peran spesifik guru di lingkungan kampus maupun media informasi masih belum sepenuhnya mendalam atau merata. Agar implementasi kebijakan tidak mengalami distorsi di lapangan, kejelasan instruksi dasar mengenai apa saja tindakan nyata yang harus dilakukan guru saat jam makan siang berlangsung wajib dipertegas melalui panduan praktis yang mudah

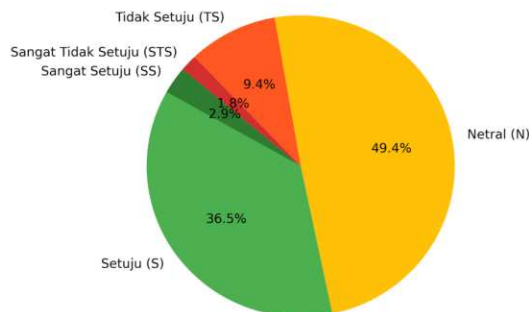
dipahami oleh seluruh calon pendidik sebelum mereka terjun ke sekolah. Temuan bahwa 40,4% responden bersikap netral sejalan dengan studi Yahya (2024) yang menyatakan bahwa sosialisasi kebijakan publik di sektor pendidikan sering kali berhenti pada tingkat normatif dan gagal menyentuh ranah operasional. Calon guru memahami mengapa kebijakan MBG dilaksanakan, tetapi kurang memahami bagaimana mekanisme penanganannya di ruang kelas secara rinci.



Gambar 1. Diagram Pie Persentase Dimensi Komunikasi

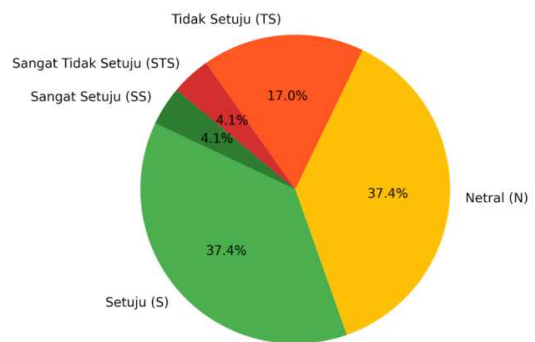
Dimensi kedua adalah Sumber Daya, yang mencakup kecukupan kapasitas pelaksana baik dari segi keahlian, waktu, maupun sarana pendukung dalam menjalankan tugas barunya. Data menunjukkan bahwa dimensi sumber daya menjadi aspek yang paling banyak menuai respons netral dari para responden, yakni mencapai angka 49.4%, dengan persentase setuju sebesar 36.5% dan tidak setuju sebesar 9.4%. Tingginya angka netral ini mengindikasikan adanya rasa kurang percaya diri atau keraguan mendalam di kalangan mahasiswa calon guru mengenai kecukupan kurikulum program studi mereka dalam memberikan bekal pengetahuan gizi seimbang yang memadai untuk diedukasikan kepada siswa. Selain itu, kemampuan dalam mengelola pembagian waktu secara efektif antara kegiatan belajar mengajar (KBM) konvensional dengan tugas pengawasan makan siang yang menyita energi juga menjadi kekhawatiran tersendiri yang memerlukan penguatan kompetensi manajerial ekstra. Tingginya angka netral (49,4%) pada dimensi sumber daya memperkuat temuan Wulandari (2022), yang menggarisbawahi bahwa efektivitas program nutrisi sekolah sangat

ditentukan oleh kompetensi manajerial staf pelaksana. Mahasiswa calon guru merasa keahlian pedagogik konvensional yang mereka pelajari belum mencakup manajemen operasional kesehatan dan tata kelola gizi.



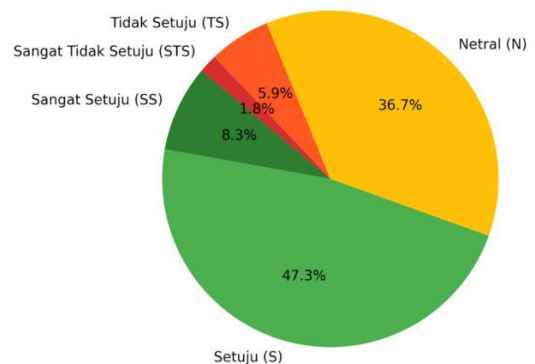
Gambar 2. Diagram Pie persentase Dimensi Sumber Daya

Dimensi ketiga adalah Disposisi, yang merepresentasikan kecenderungan, sikap, atau komitmen psikologis dari para pelaksana kebijakan dalam menerima dan menjalankan program tersebut di sekolah. Hasil analisis data pada dimensi disposisi menunjukkan dinamika yang menarik, di mana persentase setuju dan netral berimbang di angka 37.4%, namun terdapat total ketidaksetujuan (TS dan STS) yang cukup mencolok, yakni mencapai lebih dari 21%. Pola ini memperlihatkan adanya resistensi atau beban psikologis tersendiri di kalangan mahasiswa calon guru yang memandang bahwa pengawasan program MBG berpotensi meningkatkan beban administratif yang dapat mengganggu fokus utama mereka dalam mengajar. Optimisme bahwa kehadiran makanan gratis akan mempermudah fokus belajar siswa di kelas memang ada, tetapi pemerintah dan manajemen sekolah harus mampu meredam kekhawatiran guru dengan memberikan insentif moral maupun struktural yang sepadan agar komitmen kerja tetap terjaga. Resistensi sebesar 21,1% pada dimensi disposisi selaras dengan temuan Ramadhan & Utami (2024) mengenai tingginya risiko burnout dan penurunan kepuasan kerja guru akibat akumulasi beban administratif non-instruksional. Kesiapan mental mahasiswa calon guru menjadi terhambat karena kekhawatiran bahwa peran utama mereka sebagai pendidik akan terdistorsi oleh penugasan logistik harian.



Gambar 3. Diagram Pie persentase Dimensi Disposisi

Dimensi keempat sekaligus terakhir dalam model Edwards III adalah Struktur Birokrasi, yang menilai kejelasan alur kerja, pembagian tanggung jawab, serta ketersediaan prosedur operasional standar dalam birokrasi sekolah. Dimensi ini memperoleh respons paling positif dibandingkan dimensi lainnya, dengan angka setuju mencapai 47.3% dan sangat setuju sebesar 8.3%, sementara respons netral berada di angka 36.7%.



Gambar 4. Diagram Pie persentase Dimensi Birokrasi

Hal ini menandakan bahwa sebagian besar mahasiswa calon guru telah memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai kepada siapa mereka harus berkoordinasi jika terjadi kendala pada menu makanan, serta mampu membedakan batasan tanggung jawab antara pihak guru dengan pihak vendor atau dapur umum. Pemahaman yang matang mengenai Standard Operating Procedure (SOP) distribusi makanan yang higienis di kelas ini menjadi modal awal yang sangat berharga untuk menjamin kelancaran tata kelola administrasi program MBG secara akuntabel. Tingginya kesiapan pada dimensi struktur

birokrasi (55,6%) mendukung penelitian Setyawan & Rahmawati (2025). Mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran memiliki pemahaman yang solid terhadap rantai komando, koordinasi vendor, dan akuntabilitas pelaporan. Hal ini mengindikasikan bahwa calon pendidik siap secara kelembagaan apabila pembagian peran (SOP) dibuat secara transparan.

KESIMPULAN

Secara garis besar, kesiapan mahasiswa calon guru dalam mengimplementasikan kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) berada pada kategori moderat menuju siap, dengan dominasi respons setuju dan netral di setiap dimensinya. Berdasarkan perspektif teori George C. Edwards III, dimensi struktur birokrasi menjadi aspek terkuat karena kejelasan SOP dan alur koordinasi yang relatif dipahami dengan baik oleh responden, sedangkan dimensi sumber daya dan disposisi menjadi titik krusial yang memerlukan perhatian ekstra akibat tingginya keraguan terkait kompetensi gizi serta kekhawatiran akan membengkaknya beban kerja administratif guru. Untuk mengoptimalkan keberhasilan implementasi program ini, disarankan kepada lembaga pendidikan tinggi kependidikan untuk mulai mengintegrasikan materi kesehatan sekolah dan manajemen gizi dasar ke dalam kurikulum perkuliahan, serta menyusun panduan teknis yang jelas guna membangun disposisi positif dan kesiapan mental yang kokoh bagi para calon pendidik masa depan.

Keterbatasan Penelitian (Limitations)

- Ukuran dan Cakupan Sampel: Sampel terbatas pada 58 mahasiswa dari satu program studi di satu universitas (UNM), sehingga hasil tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh calon guru di Indonesia.
- Penggunaan Data Persepsional: Data mengukur persepsi kesiapan sebelum kebijakan diimplementasikan penuh, bukan kinerja riil di lapangan.
- Teknik Sampling: Menggunakan convenience sampling. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan stratified random sampling lintas program studi dan lintas LPTK.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2022). Implementasi Kebijakan Publik di Indonesia: Teori dan Studi Kasus. *Jurnal Analisis Kebijakan Publik*, 8(2), 115-128.
- Edwards, G. C. (2021). Re-visiting Policy Implementation in Democratic Societies. *International Journal of Public Administration Review*, 14(1), 45-59.
- Handayani, T., & Fitriani, S. (2023). Kesiapan Kompetensi Calon Guru dalam Menghadapi Program Non-Instruksional di Sekolah. *Jurnal Kependidikan dan Pembelajaran*, 11(3), 201-214.
- Kurniawan, A., & Saputra, H. (2024). Persepsi Mahasiswa LPTK Terhadap Kebijakan Nutrisi Sekolah Sekaligus Peran Adminstrasinya. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 15(2), 89-102.
- Lestari, P., dkk. (2025). Evaluasi Kesiapan Struktur Birokrasi Sekolah Menengah dalam Menghadapi Program Makan Siang Gratis. *Jurnal Manajemen Pendidikan Indonesia*, 13(1), 34-48.
- Naufani, Z. L., & Uang, D. P. (2026). Analisis Kebijakan Pengangkatan PPPK dalam Program Makan Bergizi Gratis. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 13(5), 163-169.
- Nugroho, R. (2023). Kebijakan Publik: Implementasi, Monitoring, dan Evaluasi Program Sosial. *Journal of Governance and Policy*, 9(4), 410-425.
- Pratama, M. R. (2022). Peran Komunikasi Massa dalam Diseminasi Kebijakan Nutrisi Anak Nasional. *Jurnal Komunikasi Publik dan Administrasi*, 6(2), 77-88.
- Ramadhan, I., & Utami, W. (2024). Analisis Beban Kerja Administratif Guru: Tantangan Bagi Implementor Kebijakan Baru. *Jurnal Teori dan Praksis Pembelajaran*, 12(2), 155-168.
- Santoso, B. (2023). Teori George C. Edwards III dalam Menakar Keberhasilan Program Makan Gratis di Sektor Pendidikan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 19(3), 220-235.
- Setyawan, D., & Rahmawati, E. (2025). Kesiapan Mahasiswa Administrasi Perkantoran dalam Mengelola Logistik Sekolah Sesuai SOP Kontemporer. *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran (JPAP)*, 14(1), 50-64.
- Siregar, F. A. (2024). Dampak Implementasi Kebijakan Gizi Sekolah terhadap Retensi

- Fokus Belajar Siswa. *Indonesian Journal of School Health*, 7(2), 112-124.
- Wijaya, C., & Hidayat, R. (2023). Disposisi Guru dalam Implementasi Kebijakan Strategis Nasional: Studi Kualitatif Fenomenologi. *Jurnal Pedagogi dan Dinamika Pendidikan*, 11(4), 310-322.
- Wulandari, S. (2022). Sumber Daya Organisasi Sekolah dalam Penerapan Manajemen Program Kesehatan Nutrisi Peserta Didik. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 10(2), 143-156.
- Yahya, M. (2024). Sosialisasi Kebijakan Publik di Sektor Pendidikan: Mengapa Banyak Calon Pendidik Kurang Informasi?. *Policy and Education Review*, 5(3), 185-199.
- Zainuddin, A., dkk. (2026). Analisis Perspektif Teoretis George C. Edwards III Terhadap Program Makan Bergizi Gratis di Lingkungan Sekolah Dasar. *Jurnal Kebijakan Sosial Budaya*, 17(1).